

PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN KUALITAS AUDIT TERHADAP PENENTUAN OPINI AUDIT

Abdul Rahman¹⁾ dan Titi Suhartati²⁾

Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta, Kampus Baru UI Depok 16425
abdulrahman_gmk@yahoo.com¹⁾, b_titis@yahoo.com²⁾

Abstrak

Penelitian ini menguji pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi dan kualitas audit terhadap penentuan opini audit. Penelitian menggunakan data primer yang diperoleh metode survey menggunakan kuesioner. Metode pemilihan sampel menggunakan purposive sampling dengan memilih akuntan yang bekerja pada KAP Big Four dan Non Big Four di wilayah Jakarta dan Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan Model SEM, sedangkan analisis dengan pengolahan data menggunakan software LISREL. Hasil uji model menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi tidak signifikan terhadap opini audit, sedangkan kualitas audit signifikan berpengaruh terhadap penentuan opini audit.

Kata Kunci: *system informasi, kualitas audit, opini*

Abstract

This research tested the influence of the implementation of accounting information system and audit quality towards determining audit opinion. This research uses primary data that obtained with questionnaire survey method. The sample gotten by using purposive sampling by choosing accountant that work with Big Four KAP and Non Big Four in Jakarta and Bekasi area. This research uses SEM Model approach, while data processing analysis uses LISREL Software. Tested result model indicates that accounting information system not significant against audit opinion, while audit quality significantly affecting determination of audit opinion.

Keywords: *information system, audit quality, opinion*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terbukti memiliki peran dan memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pada tahun 2009 tercatat kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia mencapai sekitar 45% atau senilai Rp2.000 triliun, sedangkan untuk tahun 2010 diperkirakan UMKM mampu memberi kontribusi lebih besar lagi kepada PDB Indonesia yakni sekitar Rp3.000 triliun (www.depkop.go.id). Pada tahun 2010 jumlah unit UMKM di Indonesia mencapai 52.2 juta unit usaha yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Besarnya jumlah UMKM tersebut mencerminkan besarnya potensi yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan bagi

UMKM untuk dapat lebih berkontribusi bagi negeri ini. Di saat banyak perusahaan besar yang bangkrut dan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), UMKM mampu menyerap para pengangguran untuk dapat bekerja kembali.

Pencapaian yang luar biasa dan potensi yang besar dari UMKM tersebut sering terkendala masalah permodalan untuk mengembangkan usaha serta masalah pemasaran produk kepada masyarakat. Pada dasarnya UMKM memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan kredit sebagai suntikan modal. Hingga saat ini banyak program pembiayaan bagi UMKM baik yang dijalankan oleh pemerintah maupun oleh perbankan. Salah satu program pemerintah Indonesia terkait pembiayaan UMKM adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang pada tahun 2009 ditargetkan sekitar Rp20

triliun. Tujuan dari KUR tersebut adalah untuk menjadi solusi pembiayaan modal yang efektif bagi UMKM, sebab selama ini banyak UMKM yang terkendala untuk akses terhadap perbankan untuk mendapatkan bantuan pembiayaan (Basri & Nugroho, 2009). Namun pada prakteknya realisasinya jauh dari target Rp20 triliun yakni hanya sebesar Rp14,8 triliun. Penyebab rendahnya penyaluran KUR tersebut karena bank yang ditunjuk sebagai penyalur KUR masih telalu berhati-hati dalam penyaluran kredit, karena tidak memiliki akses informasi yang memadai terkait kondisi UMKM. Mayoritas pengusaha UMKM tidak mampu memberikan informasi akuntansi terkait kondisi usahanya sehingga membuat informasi tersebut menjadi lebih mahal bagi perbankan (Baas dan Schrooten, 2006).

Informasi Akuntansi dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Namun praktek akuntansi keuangan pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) masih rendah dan memiliki banyak kelemahan (Suhairi, 2004; Raharjo & Ali, 1993; Benjamin, 1990; Muntoro, 1990). Pihak bank dan fiskus seringkali mengeluhkan ketidakmampuan dan atau kelemahan-kelemahan UKM dalam menyusun laporan keuangan. Benjamin (1990) berpendapat bahwa kelemahan UKM dalam penyusunan laporan keuangan itu antara lain disebabkan rendahnya pendidikan dan kurangnya pemahaman terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Sedangkan Muntoro (1990) berpendapat bahwa rendahnya penyusunan laporan keuangan disebabkan karena tidak adanya peraturan yang mewajibkan penyusunan laporan keuangan bagi UKM.

Standar akuntansi keuangan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan harus diterapkan secara konsisten. Namun karena UKM memiliki berbagai keterbatasan, kewajiban seperti itu diduga dapat menimbulkan biaya yang lebih besar bagi UKM dibandingkan dengan manfaat yang dapat dihasilkan dari adanya informasi akuntansi tersebut (*cost-effectiveness*). Di samping itu, tersedianya

informasi yang lebih akurat melalui informasi akuntansi yang dihasilkan diduga tidak mempengaruhi keputusan atas masalah yang dihadapi manajemen (*relevance*).

Dengan akuntansi yang memadai maka pengusaha UMKM dapat memenuhi persyaratan dalam pengajuan kredit berupa laporan keuangan, mengevaluasi kinerja, mengetahui posisi keuangan, menghitung pajak, dan manfaat lainnya (Warsono & Murti, 2010). Pelaksanaan pembukuan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan merupakan hal yang masih sulit bagi UMKM. Keterbatasan pengetahuan pembukuan akuntansi, rumitnya proses akuntansi, dan anggapan bahwa laporan keuangan bukanlah hal yang penting bagi UMKM (Jati et al., 2009). Berbagai macam keterbatasan lain dihadapi oleh UMKM mulai dari latar belakang pendidikan yang tidak mengenal mengenai akuntansi atau tata buku, kurang disiplin dan rajinnya dalam pelaksanaan pembukuan akuntansi, hingga tidak adanya kecukupan dana untuk mempekerjakan akuntan atau membeli *software* akuntansi untuk mempermudah pelaksanaan pembukuan akuntansi.

Terkait dengan kondisi tersebut di atas, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tahun 2009 telah mensahkan Standar Akuntansi untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK ETAP tersebut akan berlaku efektif per 1 Januari 2011 namun penerapan sebelum tanggal efektif diperbolehkan. Penggunaan SAK ETAP ini adalah ditujukan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik yakni entitas yang 1) Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, dan 2) Entitas yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal.

SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik merupakan salah satu Standar Akuntansi yang penggunaannya ditujukan untuk entitas usaha yang tidak memiliki akuntabilitas publik, seperti entitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Secara umum SAK ETAP ini lebih mudah dipahami dan tidak sekompleks SAK Umum. Selain adanya

SAK ETAP tersebut, kemudahan lain bagi UMKM dalam hal pembukuan akuntansi adalah semakin banyaknya *software* akuntansi buatan dalam negeri maupun luar negeri yang telah secara khusus dirancang bagi UMKM seperti Zahir. Masa mendatang diharapkan UMKM mampu melakukan pembukuan akuntansi untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih informatif dengan tujuan tentunya memberikan kemudahan bagi investor maupun kreditor untuk memberikan bantuan pembiayaan bagi para pengusaha UMKM.

Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan penelitian fokus pada pengaruh penerapan SAK ETAP terhadap kualitas laporan keuangan UMKM dan apakah kualitas laporan tersebut berpengaruh pada besaran kredit yang disetujui oleh bank/lembaga keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penetapan SAK ETAP terhadap kualitas laporan keuangan UMKM dan menguji pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap besaran kredit yang disetujui oleh bank/lembaga keuangan.

Objek penelitian adalah pengusaha UMKM yang berlokasi di wilayah Depok, dan sekitarnya karena di wilayah ini terdapat cukup banyak UMKM. Sekaligus mengetahui pemahaman pengusaha UMKM terhadap SAK ETAP.

METODE PENELITIAN

Data dan Sampel Penelitian

Data penelitian menggunakan data primer dengan melakukan survey, wawancara, kuesioner dan melalui *email* kepada pengusaha UMKM di wilayah Depok dan Bogor yang terdaftar pada Departemen Koperasi pada periode penelitian yang 2010-2011. Responden dalam kuesioner ini diperkirakan berjumlah 60 responden, yaitu pengusaha UMKM yang ukuran usahanya tidak tergolong usaha besar, dan berlokasi di wilayah Depok dan sekitarnya. Kuesioner terlampir merupakan pengembangan dari kuesioner Rudiantoro & Siregar (2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil UKM Depok

Latar belakang pendidikan

Tingkat pendidikan dengan frekuensi tertinggi adalah SMA (37,4%), diikuti S1 (30,8%) dan D3 (20,6%). Sedangkan untuk SMP, D1, S2 dan SD masing-masing 6,5 %, 2,8%, 0,9%, dan 0,9%.

Bentuk Kepemilikan

Bentuk kepemilikan dengan frekuensi tertinggi adalah kerjasama sebanyak 52 orang (88%) dan bentuk kepemilikan lainnya sebanyak 8 responden (6,4%).

Periode operasi usaha

Periode operasi usaha yang memiliki frekuensi tertinggi adalah usaha yang operasinya kurang dari lima tahun sebanyak 59 responden (53,6%), kemudian disusul oleh usaha yang operasinya antara lima sampai sepuluh tahun sebanyak 32 responden (29,1 %). Usaha yang operasi usahanya memiliki frekuensi paling sedikit adalah yang operasinya lebih dari sepuluh tahun yaitu sebanyak 19 responden (17,3%).

Legalitas usaha

UKM yang sudah memiliki legalitas usaha lebih banyak daripada yang lainnya. Responden yang menjawab ya memiliki frekuensi sebanyak 41 atau 62,6%, sedangkan untuk yang menjawab tidak memiliki frekuensi 19 atau 37,4%.

Jumlah karyawan yang dimiliki

Usaha yang memiliki jumlah karyawan kurang dari lima belas orang memiliki frekuensi paling banyak, yaitu sebesar 70 responden (64,2%). Frekuensi tertinggi kedua yaitu usaha yang tidak memiliki karyawan sebanyak 20 atau 18,3%, kemudian diikuti oleh usaha dengan jumlah karyawan lebih dari 50 orang sebanyak 11 atau 10,1%. Usaha dengan jumlah karyawan 16 sampai 30 orang sebanyak 7 atau 6,4%. Sedangkan untuk usaha yang jumlah karyawannya berkisar antara 31-50 orang

memiliki frekuensi paling sedikit, yaitu hanya 1 (0,9%).

Area pemasaran

UKM dengan area pemasarannya lokal memiliki frekuensi paling besar yaitu sebesar 88 (80%), kemudian diikuti oleh usaha dengan area pemasarannya nasional sebesar 20 (18,2%). Sedangkan untuk frekuensi terkecil yaitu usaha dengan area pemasaran luar negeri hanya sebesar 2 (1,8%).

Penerapan akuntansi

Sebanyak 94 responden telah melakukan akuntansi atau sebesar 85,5%. Sedangkan sisanya sebanyak 16 atau 14,5%, belum melakukan akuntansi.

Walaupun sebagian besar UKM telah melakukan akuntansi, namun masih ada juga yang belum melakukan pembukuan. Hal ini dikarenakan oleh berbagai macam hal, yaitu:

- 1) Ada yang beranggapan karena usaha yang mereka jalankan merupakan usaha keluarga dan tidak begitu besar maka tidak diperlukan akuntansi.
- 2) Karena kurangnya pengetahuan atau keterampilan seseorang yang berhubungan dengan akuntansi.
- 3) Tidak adanya tenaga ahli dibidang akuntansi.
- 4) Dana yang digunakan untuk usaha seringkali bercampur dengan dana sendiri, atau langsung digunakan untuk membeli barang tanpa sempat melakukan akuntansi terlebih dahulu.
- 5) Akuntansi terlalu rumit, juga dikarenakan waktu yang ada sudah tersita untuk pekerjaan, sehingga sulit sekali menyisihkan waktu untuk menyusun akuntansi.
- 6) Kegiatannya masih terbatas sehingga pendapatannya tidak tetap.

Neraca adalah cermin kondisi keuangan perusahaan dan berfungsi sebagai saran untuk mengukur likuiditas suatu usaha. Neraca dapat membantu pemilik UKM untuk dapat mengidentifikasi kekuatan dan kemampuan perusahaan. Neraca

adalah laporan keuangan yang diperlukan oleh pemegang saham, perbankan dan penanam modal.

Neraca atau *Balance Sheet* digunakan untuk:

1. dengan mudah mengidentifikasi kekuatan dan kemampuan yang dimiliki perusahaan,
2. melihat daftar harta dan utang serta modal kerja yang dimiliki perusahaan selama periode laporan tersebut,
3. mengevaluasi likuiditas perusahaan,
4. melihat turun naiknya nilai perusahaan,
5. menganalisa kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek dan jangka panjang.

Komponen Neraca

Harta atau *Asset*

Sumber-sumber yang digunakan perusahaan untuk menjalankan usaha seperti uang tunai, dividen, tanah, bangunan dan peralatan.

Utang atau *Liability*

Kewajiban atau utang perusahaan kepada pihak ketiga, cicilan pinjaman, kewajiban pembayaran pajak, cuti karyawan yang belum dibayarkan dan lain-lain.

Modal Sendiri atau *Equity*

Modal sendiri adalah harta setelah dikurangi utang. Modal sendiri termasuk investasi awal dan investasi yang berjalan yang ditanam oleh pemegang saham

Yang bertanggung jawab dalam pencatatan informasi akuntansi

Ternyata pencatat informasi akuntansi dengan frekuensi terbanyak dilakukan oleh pemilik yaitu sebanyak 48 atau 61,7%, kemudian diikuti oleh asisten / pegawai biasa sebanyak 8 atau 21,3%. Pencatat informasi akuntansi yang dilakukan oleh akuntan / ahliakuntansi memiliki frekuensi sebanyak 4 atau 13,8%. Sedangkan yang memiliki frekuensi sebanyak 3 atau 3,2%. akuntansi memiliki frekuensi sebanyak 13 atau 13,8%. Sedangkan yang memiliki frekuensi sebanyak 3 atau 3,2%.

UKM yang telah membuat dan mengarsip catatan utang piutang lebih banyak yaitu 77 UKM (70%), sedangkan yang menjawab tidak yaitu sebanyak 33 atau 30%.

Pembuatan dan pengarsipan laporan penerimaan dan pengeluaran

UKM yang telah membuat dan mengarsip laporan penerimaan dan pengeluaran lebih besar daripada yang tidak. Responden yang menjawab ya memiliki frekuensi tertinggi yaitu sebanyak 44 atau 82,7%, sedangkan yang menjawab tidak yaitu sebanyak 16 atau 17,3%. Banyak manfaat dan keputusan usaha yang dapat dijalankan berdasarkan akuntansi dan laporan akuntansi, yaitu:

- 1) Penilaian kinerja usaha dan sebagai bahan evaluasi untuk yang akan datang.
- 2) Berguna sebagai dasar pertimbangan pembelian bahan baku untuk produksi dan alat-alat produksi.
- 3) Keputusan mengenai harga, misalnya penentuan harga jual, banting harga, kenaikan harga barang / jasa, dan lain-lain.
- 4) Mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank.
- 5) Untuk pengembangan usaha, keputusan untuk membuka atau menutup cabang.
- 6) Penambahan dan pengembangan sumber daya manusia, meningkatkan penghasilan karyawan, pemberian bonus kepada karyawan.
- 7) Penyusunan anggaran untuk periode berikutnya.
- 8) Penambahan asset usaha.
- 9) Promosi usaha.

Pembahasan alternatif penyusunan laporan keuangan yang dapat diterapkan pada UKM, dikembangkan berdasarkan pertimbangan praktek sektor pemerintahan yang saat ini dikembangkan pemerintahan Indonesia.

Basis Akuntansi

Basis kas merupakan salah satu alternatif dalam pengakuan terjadinya suatu transaksi, di mana suatu transaksi akan dicatat apabila

telah terjadi penerimaan dan pengeluaran kas. Basis akrual akan mencatat suatu transaksi pada saat terjadinya, tanpa mempertimbangkan apakah kas telah diterima atau dikeluarkan. Sedangkan basis kas modifikasi merupakan basis campuran, di mana untuk menyusun laporan APBD (dapat disetarakan dengan laporan laba rugi pada perusahaan bisnis) digunakan basis kas, dan untuk lainnya menyusun neraca digunakan basis akrual.

Penggunaan basis kas baik pada sektor pemerintahan maupun sektor swasta diyakini telah mengalami kegagalan. Kegagalan utama disebabkan kesulitan dalam menyusun neraca, sekalipun untuk menyusun laporan APBD (dapat disetarakan dengan laporan laba rugi pada perusahaan bisnis) masih dimungkinkan.

Penerapan basis kas modifikasi pada sektor pemerintahan sangat dimungkinkan karena adanya kesamaan dan kebijakan yang sama dalam praktek penerimaan dan pengeluaran kas pada organisasi pemerintahan di Indonesia sehingga hal itu sangat dimungkinkan dapat diterapkan.

Praktek penerimaan dan pengeluaran kas pada sektor bisnis tidak sama dengan pemerintahan, karena pada sektor bisnis kemungkinan terjadinya penjualan dan pembelian secara kredit; yang berarti tidak memerlukan penerimaan dan pengeluaran kas mungkin saja terjadi setiap saat. Kemungkinan untuk mengatur sistem transaksi yang terjadi pada pihak swasta tidak segampang pada organisasi pemerintahan. Oleh sebab itu, kebijakan untuk mengatur pihak swasta sama dengan sektor pemerintahan adalah suatu hal yang tidak mungkin. Oleh sebab itu, penerapan basis kas modifikasi pada sektor bisnis UKM tidak mungkin dilakukan.

Berdasarkan pertimbangan kesulitan membuat kebijakan lalu lintas kas pada sektor bisnis maka alternatif yang paling dimungkinkan adalah dengan menerapkan basis akrual, sebagaimana telah diterapkan selama ini.

Proses Akuntansi

Proses pencatatan transaksi yang terjadi dapat dilakukan dengan cara yang sangat sederhana ke cara yang lebih komplis. Cara atau metode mana yang akan dipilih akan dipengaruhi oleh skala usaha. Jika penerapan akuntansi tersebut masing untuk usaha yang berskala kecil, maka metode yang paling praktis adalah dengan menggunakan persamaan akuntansi dalam bentuk kolom-kolom. Tetapi metode seperti ini tidak praktis jika frekuensi dan jenis transaksi demikian banyak.

Metode pencatatan transaksi berikutnya adalah dengan menggunakan jurnal umum dan dengan jurnal khusus. Penggunaan jurnal umum dan jika dilakukan secara manual akan sangat memberatkan, terutama dalam proses pemindahbukuan (posting) ke buku besar. Hal ini disebabkan karena setiap transaksi yang terjadi harus dipindahbukuan ke buku besarnya, mungkin bisa berjumlah ratusan atau ribuan transaksi setiap hari. Metode pencatatan yang lebih praktis adalah dengan menggunakan jurnal khusus. Jika menggunakan jurnal khusus, pemindahbukuan untuk pos-pos tertentu (terutama kas) dapat dilakukan jumlah kumulatif penerimaan kas dalam suatu periode tertentu. Dengan demikian, metode dengan menggunakan jurnal khusus jauh lebih praktis. Jurnal khusus yang biasanya digunakan terdiri dari:

- Jurnal penerimaan kas
- Jurnal pengeluaran kas
- Jurnal penjualan
- Jurnal pembelian
- Jurnal umum

Namun demikian, salah satu kesulitan bagi UKM dalam menyusun laporan keuangan adalah proses pemindahbukuan ke buku besar. Hal ini disebabkan karena hukum debit dan kredit suatu perkiraan (pos) yang seringkali dianggap sangat membingungkan bagi pengusaha Kecil dan Menengah. Salah satu alternatif untuk mengatasi hal ini adalah dengan menggabungkan antara jurnal khusus dengan buku besar. Penggabungan ini

dilakukan dengan menambahkan kolom-kolom khusus pengganti buku besar dibagian samping kanan jurnal khusus yang dibuat. Hal ini sangat dimungkinkan karena jenis transaksi pada UKM relatif tidak banyak.

Proses pencatatan seperti ini sebetulnya adalah penggabungan metode pencatatan dengan kolom-kolom persamaan akuntansi dengan jurnal khusus. Dengan penggabungan ini berarti tidak dibutuhkan lagi proses pemindahbukuan dari jurnal ke buku besar. Dengan demikian, proses penyusunan laporan dapat dilaksanakan dengan cara yang lebih sederhana dibandingkan dengan menggunakan metode lainnya.

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan, implikasi, dan saran sebagai berikut:

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Sebahagian besar pengelola UKM di wilayah depok menyatakan telah menerapkan pencatatan akuntansi dan dilakukan oleh si pemilik UKM sendiri.
2. Informasi akuntansi digunakan dalam pengambilan keputusan usaha sesuai prioritasnya, yaitu dalam hal: pembelian bahan baku dan alat produksi, penetapan harga, pengajuan tambahan modal ke bank, ekspansi usaha.
3. Profitabilitas, daya saing dan pertumbuhan serta perkembangan usaha sebagai kinerja UKM diukur berdasarkan catatan harian utang piutang, laporan penerimaan dan pengeluaran bulanan. Kinerja UKM dalam waktu lima tahun terakhir berhasil mencapai laba yang diinginkan dan optimismis akan meraih laba untuk empat tahun mendatang. Sebagian besar UKM di Depok memiliki pesaing usaha dan usahanya terus mengalami tumbuh dan berkembang selama lima tahun terakhir. Faktor penghambat perkembangan usaha yang utama adalah permodalan dan keuangan.

4. SAK ETAP mengandung berbagai standar yang harus diikuti dan menjadi pedoman dalam menyusun laporan keuangan. Namun demikian, secara umum terdapat dua jenis standar yaitu "standar pengukuran" dan "standar pengungkapan". "Standar pengukuran" merupakan standar yang digunakan dalam mengukur suatu kejadian yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan; kapan dan bagaimana menentukan nilai dari suatu transaksi. Sedangkan "standar pengungkapan" mengandung keharusan untuk mengungkapkan transaksi-transaksi tertentu supaya kejadian dan transaksi tersebut lebih dipahami oleh pemakai laporan keuangan.
5. Berdasarkan pengukuran konstruk *relevance* serta dengan menggunakan 5 indikator "standar pengukuran" dan 5 indikator "standar pengungkapan" dapat disimpulkan bahwa SAK lebih relevan bagi usaha besar dibandingkan UKM. Kesimpulan yang sama juga dihasilkan berdasarkan pengukuran konstruk *cost-effectiveness* dan dengan menggunakan 5 indikator "standar pengukuran" dan 5 indikator "standar pengungkapan" bahwa SAK lebih lebih bermanfaat bagi usaha besar dibandingkan UKM.
6. Secara keseluruhan hasil penelitian ini menyokong temuan penelitian terdahulu. Baik dengan menggunakan ukuran *relevance* maupun dengan menggunakan ukuran *cost-effectiveness*; SAK yang dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan di Indonesia lebih memberatkan bagi UKM dibandingkan usaha besar.
7. Teknik dan proses akuntansi yang digunakan diterapkan UKM di Indonesia masing banyak terpengaruh dengan sistem Tata Buku sehingga banyak yang tidak mampu menyiapkan laporan keuangan secara lengkap. Umumnya, UKM menggunakan buku kas harian yang kemudian dari buku tersebut disusun laporan laba rugi.

Sedangkan untuk menyusun laporan keuangan lainnya, ditemui berbagai kesulitan sehingga banyak yang tidak mampu menyiapkannya.

8. Sekalipun memiliki pengetahuan dalam bidang akuntansi, UKM umumnya tidak menerapkan sistem akuntansi yang baik sesuai dengan ilmu akuntansi yang pernah mereka peroleh. Alasan utama kenapa tidak menggunakan sistem akuntansi yang baik adalah selain merepotkan juga karena dengan sistem sederhana (buku kas harian) mereka juga sudah dapat memenuhi informasi yang dibutuhkan dalam mengelola usaha mereka.
9. Metode yang lebih sederhana yang dapat digunakan dalam menyusun laporan keuangan pada UKM adalah dengan menggabungkan penggunaan jurnal khusus dengan buku besar dengan menambahkan kolom-kolom yang dibutuhkan pada bagian kanan dari jurnal khusus yang dibuat. Dengan penggabungan ini berarti proses pemindahbukuan yang seringkali membingungkan pengusaha UKM dapat dihindari, dan lebih mudah dikerjakan dan dipahami.

Implikasi

Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi pengembangan UKM adalah rendah penerapan standar akuntansi pada UKM. Hal ini disebabkan karena SAK yang dijadikan pedoman penyusunan laporan keuangan saat ini masih memberatkan bagi UKM. Oleh sebab itu, untuk pengembangan UKM dan pengembangan penerapan akuntansi pada UKM, maka pihak yang berkompeten harus memikirkan ulang tentang keharusan UKM mengikuti SAK yang sama untuk seluruh skala usaha. Diharapkan temuan penelitian ini dapat menjadi perhatian bagi pihak yang berkompeten dalam pengembangan penerapan akuntansi pada UKM untuk menyusun standar akuntansi yang khusus bagi UKM.

Dibutuhkan suatu kebijakan melalui penyusunan suatu buku pedoman penyusunan akuntansi sederhana bagi UKM dengan konsep penggabungan antara jurnal khusus dengan buku besar. Diharapkan dengan penyusunan buku pedoman seperti ini, sosialisasi yang lebih terarah dapat dilakukan kepada seluruh UKM secara sama di Indonesia.

Saran

Dibutuhkan penelitian yang lebih luas dan sampel yang lebih banyak guna meningkatkan keyakinan tentang perlunya standar SAK yang khusus bagi UKM.

Dibutuhkan penyusunan studi kasus tentang cara penyusunan laporan keuangan UKM dengan menggunakan pola penggabungan antara jurnal khusus dengan buku besar dan atau buku pembantu dengan menambahkan kolom-kolom buku besar disamping kanan dari jurnal khusus yang dibuat. Diperkirakan laporan studi kasus seperti ini dapat dimanfaatkan untuk proses sosialisasi metode penyusunan laporan keuangan yang lebih sederhana ini.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kepada manajemen Politeknik Negeri Jakarta dan UP2M yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian ini dan kepada beberapa pihak yang telah memberikan dukungan terselesaikannya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abubakar Arif., dan Wibowo. 2005. Akuntansi untuk Bisnis Usaha Kecil dan Menengah. PT Grasindo : Jakarta.
- [2] Asgard Chapter Winarno. Zimele, Angelo. 2009. The SMME Business Toolkit. New York: SBDA(Pty)Ltd.
- [3] Baas, Timo dan Schrooten, Mechthild. 2006. Relationship Banking and SMEs: A Theoretical Analysis. Small Business Economic Vol 27.
- [4] Basri, Yuswar Zainul dan Nugroho, Mahendro. 2009. Ekonomi Kerakyatan : Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti Bank Mandiri.
- [5] Benjamin, W.P., (1990). Laporan Keuangan (Ikhtisar Akuntansi) Perusahaan Kecil, Dalam, Dalam Prosiding, Seminar Akuntan Nasional, Surabaya.
- [6] Burke, J.F., (1997). Report on Standards Overload, CPA Journal, 66(3), p11.
- [7] Churchill, Neil C. and Virginia. Lewis, "The Five Stages of Small Business Growth" ,Harvard Business Review, May – June 1983.
- [8] Collins, Stephen H. "Frank Swain : Advocate for Small Business in the Federal Government", Journal of Accountancy, May 1986, p. 65.
- [9] Cziráky, Tíma, dan Písarović. (2005). Determinant Of Low Approval Rate In Croatia. Small Business Economic, Vol 25.
- [10] Holmes, S. (1986). The role of practising accountants, accounting information and small business owner/manager. Australia, 259-284.
- [11] Holmes, S., & Nicholls, D. (1988). An analysis of the use of accounting information by Australian small business. Journal of Small Business Management, 26 (2), 57 - 69.
- [12] Holmes, S., & Nicholls, D. (1989). Modeling the accounting information requirements of small businesses. Accounting and Business Research, 19 (74), 143-150.
- [13] IAI, 2011, Standar Akuntansi untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).
- [14] Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Penerbit Salemba Empat : Jakarta.
- [15] Jati, Hironnymus, Bala, Beatus, dan Otnil Nisoni. 2004. Menumbuhkan Kebiasaan Usaha Kecil Menyusun

- Laporan Keuangan. *Jurnal Bisnis dan Usahawan*, II No. 8, 210 – 218.
- [16] Knutson, D.L., & Wichmann, Jr, H., (1985). The Issue of Differential Accounting Treatment For American Small Businesses, *Management Forum*, Vol. 11 Sept.
- [17] Mohan, Isaac. 2006. Financial Record-Keeping as a Tool For Small Business Success: A Case Study Of Free State Province, South Africa.
- [18] Murniati. 2002. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyiapan dan Penggunaan Informasi Akuntansi pada Pengusaha Kecil dan Menengah di Jawa Tengah. Semarang : Universitas Diponegoro.
- [19] Nair, R.D, Reittenberg, dan Larry, E., (1983). Privately Held Businesses: Is There a Standards Overload?, *Journal of Accountan*, New York.
- [20] Pinasti, M. 2001. Penggunaan Informasi Akuntansi dalam Pengelolaan Usaha Para Pedagang Kecil di Pasar Tradisional Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, No 1 Vol 3.
- [21] Raharjo, M. D., & Ali, F. (1993). Faktor-faktor keuangan yang mempengaruhi usaha kecil dan menengah di Indonesia, Dalam K. James & N. Akrasanee, *Aspek-aspek finansial usaha kecil dan menengah; Studi kasus Asean*, (pp. 16-50). Jakarta: LP3ES.
- [22] And Performance: A Research On Entrepreneurship Of Indonesia Medium Industries, Disertasi, USM, Malaysia.
- [23] Sujoko Efferin., dan Bonnie Soeherman. 2005. “Analisis Empiris Tentang Peran Akuntansi Manajemen Dalam Perencanaan Dan Pengendalian UKM”, *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi*, Vol. 4, No. 2: 71-91.
- [24] Undang-Undang No. 9 tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, 1995/1996.
- [25] Warsono, Sony dan Endra Murti. 2010. *Akuntansi UMKM Ternyata Mudah Dipahami dan Dipraktikkan*. Yogyakarta.
- [26] Williams, L.K., Chen, R.C., & Tearney, M.G., (1989). Accounting Standards: Overskill for Small Business, *The National Public Accountant*, June pp 40-43.

